

**IMPLEMENTASI *COLLABORATIVE GOVERNANCE*  
SYSTEM DALAM PENGEMBANGAN UMKM KLASTER  
BATIK DI KECAMATAN SANGATTA UTARA**

**Reza Fahmi Saputra, Aji Ratna Kusuma, Daryono**

**eJournal Administrasi Publik  
Volume 11, Nomor 1, 2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi *Collaborative Governance System* Dalam Pengembangan UMKM Klaster Batik di Kecamatan Sangatta Utara

Pengarang : Reza Fahmi Saputra

NIM : 1702015073

Program : S1 Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Administrasi Publik Fisip Unmul.

**Pembimbing I,**



**Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si.**  
NIP 19590308 198403 2 001

Samarinda, 17 Maret 2023

**Pembimbing II,**



**Daryono, M.Si., Ph.D.**  
NIP 19750416 200604 1 001

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL S1 ADMINISTRASI PUBLIK**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

|                      |                                |  |
|----------------------|--------------------------------|--|
| <b>Nama Terbitan</b> | : eJournal Administrasi Publik |                                        |
| <b>Volume</b>        | : 11                           |  |
| <b>Nomor</b>         | : 1                            |  |
| <b>Tahun</b>         | : 2023                         |  |
| <b>Halaman</b>       | : 210-221                      |  |
|                      |                                | <b>Koordinator Prodi</b><br><b>S1 Administrasi Publik</b><br><b>Dr. Fajar Apriani, M.Si.</b><br>NIP. 19830414 200501 2 003 |

# IMPLEMENTASI *COLLABORATIVE GOVERNANCE* SYSTEM DALAM PENGEMBANGAN UMKM KLASTER BATIK DI KECAMATAN SANGATTA UTARA

Reza Fahmi Saputra<sup>1</sup>, Aji Ratna Kusuma<sup>2</sup>, Daryono<sup>3</sup>

## *Abstrak*

*Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui implementasi collaborative governance dalam pengembangan UMKM klaster batik dan juga untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat pada pengembangan UMKM klaster batik. Jenis penelitian ini adalah penelitian deksriptif kualitatif dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer meliputi kepala Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, PT. Kaltim Prima Coal (KPC), dan pelaku usaha batik sedangkan data sekunder meliputi jurnal, buku-buku, dan dokumen-dokumen yang berguna untuk memperkaya data. Teknik pengumpulan data meliputi penelitian kepustakaan (library research) dan lapangan (field work research). Fokus penelitian ini menggunakan teori Ansel dan Gash serta teknik analisis data Miles dan Huberman. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa collaborative governance dengan melihat dari fenomena-fenomena yang ada dilapangan yaitu gambaran kondisi awal, proses kolaborasi, peran kepemimpinan, pola jejaring dan kemitraan, aktor yang berperan, outcome. pemasaran dan pelatihan berjalan dengan baik antara Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan PT. Kaltim Prima Coal (KPC) dengan masyarakat sebagai peserta melalui proses pembimbingan sampai masyarakat bisa memproduksi batik secara mandiri. Adapun faktor penghambat pengembangan collaborative governance UMKM klaster batik adalah terkait pada sumber daya manusia masih terdapat kurangnya pengawasan dari pihak yang terlibat dan masyarakat yang berminat mengikuti pelatihan serta bimbingan disamping masih ada yang kurang serius mengikuti pelatihan.*

**Kata Kunci :** *Collaborative governance, Pemberdayaan, UMKM.*

## **Pendahuluan**

Pemerintahan merupakan salah satu unsur terpenting dalam terciptanya sebuah negara pemerintah dibutuhkan dalam segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, pembangunan, sosial, hukum maupun segala bentuk kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang berada dalam

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [rezajefry83@gmail.com](mailto:rezajefry83@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

lingkup pemerintahan pusat, pemerintahan daerah atau bahkan desa. Dalam prinsipnya menurut UNDP dalam (Astomo, 2014:408) konsep pemerintahan yang baik atau *good governance* tidak akan pernah lepas dengan 3 sektor utama yaitu antara lain *state* (negara atau pemerintah), *society* (masyarakat) dan *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha) yang saling berinteraksi menjalankan fungsinya masing-masing secara beriringan. *Collaborative governance* merupakan sinergi pemerintah pusat / pemerintah daerah dapat menyelesaikan masalah masyarakat dengan menggandeng pihak lain yang terlibat dalam proses penyelesaian masalah. Dalam masalah ini pemerintah dan pihak swasta membantu mengajak masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terutama dibidang batik. Batik sendiri merupakan salah satu warisan khas nusantara. Keunikannya tercermin dari berbagai pola dengan maknanya masing-masing. Seiring berjalannya kemajuan serta teknologi masyarakat mulai melupakan kebudayaannya itu sendiri terutama batik. Maka dari itu pemerintah dan pihak swasta berharap dengan adanya pemberdayaan ini mampu mengangkat budaya yang dimiliki terutama batik yang tentunya juga meningkatkan industri kecil pada batik di Kecamatan Sangatta Utara.

Perkembangan batik ini sendiri yang telah dibantu oleh pihak pemerintah oleh Dinas Pariwisata, dan Dinas Perindustrian serta pihak swasta oleh PT. Kaltim Prima Coal (KPC). Pada penerapannya terkait dengan permasalahan yang ada bahwasanya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta sangat berbeda sekali dengan dilapangan. Kegiatan yang dilakukan dari segi pemerintah sendiri adalah melakukan pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan, yang mana dalam pelatihannya dilakukan selama ini tidak mengalami keberlanjutan. Pemberdayaan telah dilakukan, akan tetapi hasil dari pelatihan tersebut tidak ada pantauan lagi yang lebih jelas. Alhasil yang diharapkan sebelumnya dalam pelatihan batik tidak maksimal. Tentunya ini juga merupakan sebuah masalah terhadap SDM sehingga menurunnya sebuah mutu/kualitas.

Hal ini juga merupakan masalah penting karena dalam tata kelola pemerintahan yang baik perlu adanya pengarahannya sumber daya secara maksimal yang tentu dimiliki oleh para aktor yang berperan masing-masing dengan dasar kesepakatan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan yang dilakukan oleh pihak swasta yang dinaungi oleh PT. Kaltim Prima Coal (KPC) mereka melakukan perannya sesuai dengan dilapangan. Pada pemberdayaan batik yang dilakukan oleh pihak PT. Kaltim Prima Coal (KPC) berupa dana bantuan bangunan, alat dan pelatihan. Bantuan bangunan tersebut berupa tempat *workshop* batik dan peralatan membatik. Pada pelatihan batik sendiri pihak PT. Kaltim Prima Coal (KPC) mulai melakukan pengawasan, setelah pelatihan pun masyarakat yang mengikuti pelatihan dituntut untuk praktek langsung dalam membuat batik. Pihak PT. Kaltim Prima Coal (KPC) mengarahkan masyarakat untuk lebih meningkatkan lagi dalam membatik. Setiap bulannya PT. Kaltim Prima Coal (KPC) juga

melakukan monitoring mulai pada perkembangan batik dari segi apa yang diperlukan, dana yang dihabiskan tiap bulannya dan kebersihan lingkungannya.

Maka dari itu dalam masalah ini perlu adanya kejelasan terhadap setiap tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pihak pemerintahan, swasta, dan masyarakat untuk berupaya memaksimalkan potensi yang ada sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat pada sekitarnya. Tentunya pada pemerintah ini pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM ) dapat menambah pendapatan daerah, pihak swasta mendapatkan citra yang baik, dan masyarakat melalui pembinaan yang terarah dapat meningkatkan ekonominya. Sehingga perumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana pengembangan UMKM kluster batik di Kecamatan Sangatta Utara melalui konsep *collaborative governance* dan faktor apa saja yang menjadi penghambat *collaborative governance* UMKM kluster batik di Kecamatan Sangatta Utara.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Implementasi Kebijakan***

Meter dan Horn dalam (Lestari, 2017:469) implementasi adalah tindakantindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Disamping itu implementasi kebijakan menurut Dunn dalam (Lestari, 2017:469) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu. 12 Tangkilisan dalam (Ali, 2018:8) mendefinisikan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke dalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus.

### ***Governance***

Chema dalam (Cahyono, 2020:7) menjelaskan bahwa *governance* adalah kebijakan, sistem nilai dan lembaga yang mengatur sosial, ekonomi, politik yang dikelolala melalui interaksi antara masyarakat, pemerintah dan swasta. Oleh karena itu, Sedarmayanti mendefinisikan juga bahwa *governance* meliputi 3 peran yaitu negara/pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta yang mana dalam menjalankan *governance* tersebut melalui intreraksi-interaksi yang mereka kerjakan masing-masing. Abidin dkk dalam (Cahyono 2020:7) membagi 3 peran dalam Bergeraknya *governance*. tiga peran itu sendiri adalah pemerintah, masyarakat, dan swasta. Dalam penyelenggaraan pemerintah ketiga peran di atas tersebut tentunya saling berkolaborasi satu sama yang lain.

Konsep *governance* pada urusan-urusan publik yang sebelumnya dikelola oleh aktor tunggal yaitu pemerintah maka dirubah mejadi dikelola bersama dengan aktor lain yaitu seperti masyarakat, dan pihak swasta sehingga pemerintah tentunya tidak dapat dikatakan lagi sebagai aktor tunggal yang dominan dalam penyelenggaraan pemerintah serta juga demokrasi terhadap urusan publik. Pada konsep *governance* adanya kesetaraan yang sejajar yang merupakan bagian dari *good governance* untuk mengelola sebuah pelaksanaan dengan tata kelola

pemerintah yang baik serta adanya sebuah kemitraan disetiap domain yang ada yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.

### ***Collaborative governance***

Ansell & Gash, dalam (Astari, 2019:2) mendefinisikan *Collaborative governance* yaitu pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program dan aset publik. pada hakikatnya kolaborasi adalah suatu bentuk kerjasama dan kompromi, yaitu interaksi beberapa anggota dari unsur-unsur yang terlibat, baik itu lembaga, individu maupun pihak yang berpartisipasi, yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan akibat serta manfaat. Nilai-nilai yang mengawali proses kolaborasi adalah tujuan bersama, proses keinginan, konsensus, kejujuran, kasih sayang, bentuk berbasis komunitas, dan tentunya saling menguntungkan.

### ***Tahapan Collaborative governance***

Ansell dan Gash dalam (Nopriono, 2019:25) bahwa model *Collaborative governance* memiliki empat variabel luas yaitu Kondisi awal, Desain institusional, Kepemimpinan, Proses kolaborasi. Masing-masing variabel luas ini dapat dipilih sebagai variabel yang lebih disempurnakan. Variabel proses kolaboratif dianggap sebagai inti dari model di atas, sedangkan kondisi permulaan, desain kelembagaan dan kepemimpinan mewakili kontribusi kunci atau lingkungan untuk proses kolaborasi. Penjelasan di atas dari empat variabel model tata kelola kolaborasi adalah sebagai berikut:

1. Kondisi awal, yaitu karena adanya Indikator yang memengaruhi tersebut diantaranya adalah ketidaksimbangan kekuasaan atau sumber daya, insentif untuk berpartisipasi, dan prasejarah konflik atau kerjasama.
2. Desain Insitusional, mengacu pada kesepakatan dasar dan aturan dasar kolaborasi, yang sangat penting untuk legalitas proses kolaborasi. Akses ke proses kolaborasi itu sendiri mungkin merupakan masalah desain yang paling dasar.
3. Kepemimpinan, umumnya dianggap sebagai bagian yang sangat diperlukan untuk membimbing semua pihak untuk menghadiri rapat dan membimbing mereka melalui tugas-tugas yang sulit. Meskipun negosiasi tak berdaya terkadang dimungkinkan, sebagian besar literatur percaya bahwa mempromosikan kepemimpinan penting untuk menyatukan pemangku kepentingan dan melibatkan mereka secara aktif satu sama lain dalam bekerja sama.
4. Proses kolaborasi, menggambarkan suatu tahapan yang akan dilalui seluruh anggota yang terlibat. Dimana pada proses tersebut yang saling berkaitan. *Face to face dialogue*, yaitu pertemuan tatap muka atau sering disebut komunikasi secara langsung antar pihak yang terkait. Sehingga terjadi interaktif

antar pihak untuk membahas suatu kepentingan bersama, dengan komunikasi secara langsung diharapkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. *Trust building*, membangun kepercayaan antar pihak yang terlibat bahwasanya seluruh pihak yang terlibat memang memiliki tujuan yang sama dalam mengambil kebijakan yang terbaik untuk semua pihak. Kepercayaan biasanya dibangun dari sebuah komunikasi antar pihak terkait. *Comitment to proces*, merupakan komitmen dalam melaksanakan suatu proses guna mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Kemudian *share understanding*, yaitu berbagi pengertian dan pemahaman dalam sebuah kolaborasi, bahwasanya misi dan forum yang dibuat merupakan tanggung jawab bersama. Dan yang terakhir yaitu *outcome*, yaitu hasil yang didapatkan dari proses yang sedang berlangsung yang bisa memberikan manfaat serta bernilai strategis oleh semua pihak.

### ***Pengembangan UMKM Berbasis Klaster***

Berdasarkan laporan *Japan International Cooperation Agency JICA* dalam (Ferdinand, 2016:15), kondisi klaster dapat digolongkan menjadi 3 yaitu klaster tidak aktif, klaster aktif dan klaster dinamis. Penentuan ketiga hal tersebut dapat dilihat pada perkembangan produk, perkembangan teknologi, area pemasaran, tingkat keterampilan pelaku, tingkat kepercayaan pelaku dan antar pelaku, luasan Informasi pasar.

### ***Definisi Konsepsional***

Definisi konsepsional dalam penelitian ini adalah bagaimana tindakan ataupun proses melalui sinergi *collaborative governance* yang nantinya mampu saling melengkapi pada pengembangan UMKM klaster batik.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif agar peneliti dapat menjelaskan dan menggambarkan variabel secara mandiri dengan menganalisis data yang berifat kualitatif sehingga nantinya peneliti dapat memberi makna atau tujuan dari adanya penelitian ini. Fokus penelitian ini menggunakan teori Ansel dan Gash dengan melihat bagaimana *collaborative governance* dalam pengembangan UMKM klaster batik dan apa saja faktor penghambat pengembangan UMKM klaster batik. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang didapatkan langsung oleh peneliti dilapangan dan didukung data sekunder yaitu data yang tidak langsung diberikan kepada peneliti. Data tersebut didapatkan dari dokumen, jurnal, buku, laporan dan dokumen lain yang mendukung penelitian.

Pihak yang menjadi *key informan* dan informan yaitu sebagai berikut:

1. *Key informan* dalam penelitian ini yaitu kepala Dinas Pariwisata dan Perwakilan dari PT. KPC.
2. Informan dalam penelitian ini yaitu Dinas Perindustrian dan pelaku usaha batik.

Untuk teknis pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan

penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan meliputi pengamatan langsung, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah Miles & Huberman dengan empat tahapan analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **Hasil Penelitian dan pembahasan**

### ***Implementasi Collaborative governance System Dalam Pengembangan UMKM Klaster Batik***

#### ***1. Gambaran Kondisi Awal***

Pada teori Ansel dan Gash dalam (Astuti, dkk, 2020:76) bahwa timbul kondisi awal yaitu karena adanya Indikator yang memengaruhi tersebut diantaranya adalah ketidaksimbangan kekuasaan atau sumber daya, insentif untuk berpartisipasi, dan prasejarah konflik atau kerjasama. Dalam penelitian ini hal yang menjadi awal pada perkembangan batik adalah inisiatif dari pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengembangkan nilai suatu budaya yang ini menjadi aset kebanggaan batik. Dalam batik bahwasanya sejarah batik ini merupakan menjadi hak paten bangsa Indonesia. Terkait perkembangannya tentu yang membantu UMKM batik ini tidak hanya satu instansi melainkan melibatkan pihak-pihak yang lain. Melibatkan pihak lain dalam pengembangan batik karena adanya keterbatasan sumber daya sehingga diperlukan kontribusi dari pihak luar. Pengembangan batik ini sudah dilakukan dari Dinas Perindustrian, Dinas Pariwisata dan PT. KPC.

Pada konteks ini kondisi awal pada pengembangan usaha batik ini juga melihat dari adanya batik-batik lokal diluar dari sangatta ini maju usahanya dan juga memiliki kebanggaan tersendiri akan ciri khasnya disetiap batik yang ditunjukkan dari tiap-tiap daerah. Tentunya dalam mengembangkan batik ini adanya kontribusi karena adanya keterbatasan seperti dana sehingga diperlukan adanya pihak lain untuk bersama-sama mengembangkan batik ini. Adanya aspek demikian sehingga dilakukan pengembangan batik dari setiap program yang memang khusus untuk terlibat.

#### ***2. Proses Kolaborasi***

Pada teori Ansel dan Gash dalam (Astuti, dkk, 2020:76) bahwa pada proses kolaborasi perlu adanya tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen pada proses, pemahaman bersama dan adanya *outcome*. Mengkaji lebih dalam telah juga dilakukan penelitian terdahulu sebelumnya pada penjelasan ini terkait pada pihak-pihak pemangku kepentingan yaitu adanya tatap muka secara langsung yang dilakukan dari Dinas Indutrsi, Dinas Pariwisata, dan PT.KPC kepada masyarakat yang terlibat pada pengembangan batik itu sendiri. Selain itu juga dalam proses kolaborasi dari pihak pemangku kepentingan sudah membangun kepercayaan kepada masyarakat untuk sepenuhnya mendukung dari program yang diberikan nantinya seperti pembinaan, pemasaran, alat-alat, *reward*, dan lain

sebagainya. Disamping itu juga Dinas Perindustrian, Dinas Pariwisata, dan juga PT. KPC melakukan secara komitmen.

Adanya keterbukaan dalam proses kolaborasi tersebut sehingga terciptanya harmonisasi dalam sebuah kolaborasi dan dengan adanya itu juga melihat terus perkembangan untuk beberapa waktu dan tahun kedepannya. Dalam proses kegiatan itu tentunya masyarakat diberikan pemahaman mengenai apa saja program yang diberikan serta hasil dari setiap program yang diberikan. Pada setiap program yang dijalankan yaitu berupa pelatihan, infrastruktur bangunan, alat-alat membatik, instalasi limbah dan terakhir pemasaran produk. Hal tersebut dilakukan dengan komitmen pada setiap proses dari program masing-masing di pihak-pihak yang terlibat.

### **3. Peran Kepemimpinan**

Peran penting seorang pemimpin adalah menentukan yang terbaik untuk organisasi dan anggotanya, salah satunya dalam hal pengambilan keputusan, dan memiliki tanggung jawab penuh untuk mengambil setiap keputusan dalam berbagai situasi. Menurut Siagian dalam (Julianto, 2021:678) kepemimpinanlah yang memainkan peranan yang sangat dominan dalam keberhasilan organisasi dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan terutama terlihat dalam kinerja para pegawainya. Dalam pengembangan batik yang dilakukan dari pihak yang bersangkutan yaitu Dinas Perindustrian, Dinas Pariwisata, dan PT. KPC adalah membimbing dan mengevaluasi dari setiap program yang diberikan kepada masyarakat yang mengikuti binaanya.

Hal itu dilihat adanya koordinasi antara pemimpin atasan dengan anggotanya dan masyarakat dalam mengikuti langkah-langkah seperti pembinaan selama 1 bulan yang setelah itu diterapkan yang itu dipantau kembali hasil dari pelatihan. Meskipun ada salah satu dinas yang tidak memantau kembali perkembangannya. Penjelasan mulai dari pembinaan, Infrastruktur bangunan, alat-alat membatik dan instalasi limbah semuanya tentu adanya peran pemimpin yang mana mengarahkan kepada semua orang yang terlibat untuk saling bekerja sama khususnya dalam pengembangan batik ini.

Melihat peran kepemimpinan bahwa didalam konteks ini terkait pada pengembangan usaha batik ini adalah adanya koordinasi yang jelas dan terarah sehingga masyarakat yang ikut serta dalam program yang dijalankan benar-benar paham dari awal kegiatan berlangsung hingga selesai. Disamping juga sebagai pemimpin yang terlibat yaitu dari Dinas Perindustrian, Dinas Pariwisata, dan PT. KPC ini dapat dikatakan mampu mengontrol dari anggota yang menjalankan dari program-program tersebut serta masyarakat yang mengikuti programnya ini merasakan adanya bimbingan dengan benar.

### **4. Pola Jejaring dan Kemitraan**

Bovaird dalam (Astuti, dkk, 2020:43) mendefinisikan kemitraan sebagai pengaturan pekerjaan berdasarkan komitmen timbal balik, melebihi dan di atas yang diatur dalam setiap kontrak, antara satu organisasi di sektor publik dengan organisasi di luar sektor publik. Adanya pola jejaring dan kemitraan ini adalah

adanya kerja sama dengan pihak yang bersangkutan untuk mengembangkan batik ini. Tentunya dalam kemitraan juga ada pihak saling diuntungkan. Terkait pada perkembangan batik ini adalah dilihat dari adanya bantuan yang diberikan dari Dinas Perindustrian, Dinas Pariwisata, dan PT. KPC. Dalam hal ini juga bantuan untuk mengakses modal yaitu adanya infrastuktur pelatihan, ketersediaan alat-alat, bahan baku, pemasaran diberikan yang ini memberikan manfaat bagi ekonomi sehingga pelaku usaha pelaku usaha dibidang batik terus berkembang. Hal yang diuntungkan juga dari pihak yang terlibat adalah ingin menunjukkan bahwa batik kutim itu juga mampu bersaing dengan batik lainnya sehingga nantinya dapat menarik pelanggan yang diluar untuk datang. kemitraan yang ada diimplementasikan lewat berbagai kegiatan pelatihan keterampilan pembuatan produk yang melibatkan masyarakat, selain itu juga memberikan kepuasan bagi pemerintah setempat karena dengan banyaknya kemitraan yang terbangun sedikit banyak turut membantu pemerintah untuk meningkatkan pelayanan maupun pembangunan infrastruktur khususnya batik di Kecamatan Sangatta Utara.

#### **5. Aktor yang berperan**

Rosidi dalam (Putra, 2021:230) memetakan bahwa terdapat 3 aktor yang berpengaruh dalam proses *governance*. Tiga aktor tersebut yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. ketiga aktor tersebut saling berkolaborasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Aktor yang dimaksud adalah aktor yang berkontribusi dalam mengembangkan batik adalah Dinas Perindustrian, Dinas Pariwisata dan PT. KPC serta adanya masyarakat yang terlibat. Mengenai peran yang dilakukan pada pengembangan batik ini adalah dilihat adanya kerja sama dari Dinas indutri bahwa batik ini yang merupakan bagian IKM (industri kecil menengah) ini juga bagian tanggung jawab dari Dinas Perindutrsian sehingga peran yang dilakukan adalah membimbing pelatihan batik.

Selain itu juga adanya dukungan dari Dinas Pariwisata pada promosi produk yang tentu Dinas Pariwsata mengenalkan batik ini secara nasional dan internasional. Begitu pula dengan PT. KPC yang merupakan bagian dari CSR (*corporate social responsibility*) untuk mengembangkan batik berupa infastrukur dan instalasi limbah. Maka dalam penelitian ini mengacu pada sub fokus *collaborative governance* yaitu aktor yang berperan adalah keterlibatan untuk saling bekerja sama dari setiap aktor yang terlibat. Pengembangan UMKM klaster batik yang dilakukan peneliti dengan melihat regulasi dari program yang diberikan yaitu adanya bimbingan membatik, pembangunan infrastruktur (*workshop*), pemasaran produk dan lain sebagainya.

#### **6. Outcome**

Menurut widyatokmo (2020:40) bahwa *outcome* disini merupakan terbentuknya target rencana kerja yang dapat mendekati pada tujuan yang tepat untuk membangun momentum yang dapat menghasilkan hasil kolaborasi yang sukses serta terdapat lebih banyak *outcomes* (pencapaian keberhasilan, manfaat) daripada yang tidak diharapkan baik yang terjadi secara terencana maupun tidak

terduga. Dengan demikian, *outcome* merupakan hasil yang dicapai dari suatu program atau aktivitas dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. *Outcome* dalam penelitian disini adalah manfaat dari perkembangan batik yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Dinas Pariwisata dan PT. KPC pada setiap program kegiatan yang diberikan ke masyarakat. Tentu dari hasil wawancara tersebut dan juga tanggapan masyarakat bahwa pengembangan pada batik ini sendiri dari segi ekonomi sudah memberikan *income* pada pengrajin batik ini. Karena masyarakat sebagai peserta yang mengikuti pelatihan membatik ini di Kecamatan Sangatta Utara mampu menghasilkan produk batik sendiri dan menjualnya. meskipun belum bisa dikatakan membuka lapangan pekerjaan akan tetapi ini merupakan suatu perkembangan yang cukup baik dari usaha-usaha yang dilakukan dari pihak yang terlibat.

### **7. Pemasaran**

Menurut Chandra dalam (Wibowo, 2015:61) bahwa strategi pemasaran merupakan rencana yang menjabarkan ekspektasi perusahaan akan dampak dari berbagai aktivitas atau program pemasaran terhadap permintaan produk atau lini produknya di pasar-pasar tertentu. Program pemasaran meliputi tindakan-tindakan pemasaran yang dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk, diantaranya dalam hal mengubah harga, memodifikasi kampanye iklan, merancang promosi khusus, menentukan pilihan saluran distribusi, dan sebagainya.

Upaya yang dilakukan dari pihak yang bersangkutan adalah mempromosikannya. Hal itu dilihat dengan mengikuti beberapa *fashion show* baik nasional dan internasional. Dari PT KPC sendiri juga melakukan program, sahabat tangguh yaitu kegiatan event berkaitan dengan UMKM terutama batik ini yang menjadi produk unggulan sebagai ciri khas dari kutim. Dari upaya tersebut tentunya pelaku usaha batik ini mendapatkan pesanan dari konsumen yang terbilang cukup banyak. disamping itu juga bahwa pelaku usaha batik juga dalam melakukan pemasaran melalui beberapa media yaitu instagram, facebook, dan WA. Pemasaran yang dilakukan dari tentunya juga telah dibantu oleh pihak yang bersangkutan mengenai rancangan dalam mengiklankan produk.

### **8. Pelatihan**

Simanjuntak dalam (Nazir, 2019:153) mendefinisikan pelatihan merupakan bagian dari investasi SDM (*human investment*) untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja, dan dengan demikian meningkatkan kinerja pegawai. Dalam hal ini dari sumber daya manusia berupa pelatihan pada pengembangan batik sudah diupayakan oleh Dinas Perindustrian, Dinas Pariwisata dan PT. KPC yaitu adanya pelatihan batik di Jawa selama 1 bulan ada pula 2 minggu. Dari program itu tentunya merupakan bagian dari program untuk mengembangkan batik. Adanya pantuan lebih lanjut dari pelatihan yang diberikan tentunya ini juga melihat progres perkembangan dari setiap proses yang ada khususnya UMKM batik di kecamatan Sangatta Utara dengan menghasikan pelaku usaha yang benar-benar berkualitas. Adanya program binaan yang diberikan ke masyarakat ini adalah menambah pengetahuan dan keterampilan dalam membatik sehingga

ketika selesai dari pelatihan ini masyarakat terus konsisten dalam belajar mandiri yang tentunya juga harus dipantau kembali. Oleh karena itu dari adanya pelatihan dan bimbingan lebih lanjut tentu ini mempengaruhi kualitas pelatihan dari SDM tersebut.

### ***Faktor Penghambat Collaborative governance Dalam Pengembangan UMKM Klaster Batik***

Faktor penghambat *collaborative governance* dalam pengembangan UMKM klaster batik ini adalah sumber daya manusia. Hal ini dilihat adanya permasalahan yang terjadi dari pihak-pihak yang terlibat yang menyelenggarakan pengembangan batik terutama pada manajemen sumber daya manusia baik.

Murwansyah dalam (Huzain, 2021:4) pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hubungan industrial. Sumber daya manusia memiliki peran penting pada pengembangan kualitas kerja. Dalam hal ini masih terdapat permasalahan pada pengembangan UMKM klaster batik. Hal ini dilihat adanya kontribusi dari Dinas Perindustrian, Dinas Pariwisata dan PT. KPC dalam mengembangkan batik yaitu pelatihan membatik. Namun masyarakat yang mengikuti pelatihan tidak serius lebih lanjut sehingga itu juga yang mempengaruhi kualitas SDM yang nantinya berdampak pada hasil dari produksi. Selain itu juga peminat yang mengikuti pelatihan membatik ini sendiri terbilang sangat sepi, adanya masyarakat yang menyerah duluan karena beranggapan sulit untuk belajar dan juga masih terdapat peserta yang mengikuti pelatihan ini tidak konsisten belajar membatik. Mengacu pada manajemen SDM bahwa pada penyeleksian yang mengikuti peserta dari pelatihan yang diberikan dari Dinas Perindustrian, Dinas Pariwisata dan PT. KPC adalah penyeleksian peserta dengan benar yang masih terlihat kurang serius dengan yang akan dijalankan.

## **Penutup**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai implementasi *collaborative governance system* dalam pengembangan UMKM klaster batik di Kecamatan Sangatta Utara meliputi beberapa hal.

1. Pengembangan UMKM klaster batik melalui konsep *collaborative governance* berjalan dengan baik antara Dinas pariwisata, Dinas Perindustrian dan PT. KPC dengan masyarakat sebagai peserta melalui proses pembimbingan sampai masyarakat bisa memproduksi batik secara mandiri.
2. Faktor penghambat pengembangan *collaborative governance* UMKM klaster batik adalah kurangnya masyarakat yang berminat mengikuti pelatihan dan bimbingan disamping masih ada yang kurang serius mengikuti pelatihan.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disimpulkan di atas, maka ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan terkait implementasi *collaborative governance system* dalam pengembangan UMKM kluster adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dan swasta juga yang terlibat harus memantau lebih lanjut dan mengevaluasi perkembangan UMKM batik ini secara jelas karena masih dari beberapa Dinas yang kurang memantau lebih lanjut dari pelatihan tersebut.
2. Untuk pelaku usaha batik ini ataupun juga peserta yang mengikuti dari pelatihan seharusnya juga konsisten pada tujuan yang ditetapkan sehingga nantinya menghasilkan produk yang berkualitas.

### **Daftar Pustaka**

- Ali, M. (2018). Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 01(01), 1689–1699.
- Astari, M. M., Mahsyar, A., & Parawangi, A. (2019). Kolaborasi Antarorganisasi Pemerintah Dalam Penertiban Moda Transportasi Di Kota Makassar (Studi Kasus Kendaraan Becak Motor). *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 1(1), 1-8.
- Astomo, P. (2014). Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Kanun - Jurnal Ilmu Hukum*, 16(3), 401–420.
- Astuti, W, R. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang. Undip Press
- Cahyono, S. (2020). *Collaborative Governance Dalam Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lembaga Masyarakat Kelas II B Sinjai*. 2507(1).
- Ferdinand. (2016). Strategi Pengembangan Kluster Usaha Mikro Kecil dan Menengah Keripik Tempe di Sanan Malang. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 14(1), 1–13. <https://doi.org/10.18202/jam23026332.14.1.01>
- Huzain, H. (2021). Pengelolaan Sumber Daya Manusia. *OSF Preprints*. November, 21
- Julianto, B., & Carnarez, T. Y. A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Organisasi Professional: Kepemimpinan, Komunikasi Efektif, Kinerja, Dan Efektivitas Organisasi (Suatu Kajian Studi Literature Review Ilmu Manajemen Terapan). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), 676-691.
- Lestari, E. R. (2017). Implementasi Kebijakan Otonomi Desa Pилanju Di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 21–25.
- Nopriono, N., & Suswanta, S. (2019). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Collaborative Governance (Studi Kasus Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten kulon Progo). *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 1(1), 21-36.

- Nazir, A. (2019). Pengaruh Pelatihan Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Surya Mastika Nusantara. *Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, Dan Teknologi*, 3(1), 150-169.
- Putra, A. I. P., & Roni, M. (2021). Good Governance Dalam Lingkungan Pendidikan Tinggi (Good University Governance). Al-Idarah: *Jurnal Kependidikan Islam*, 11(2), 226-236.
- Qalby, N. A. (2018). *Collaborative governance dalam pengelolaan sampah di kelurahan paropo kecamatan panakkukang kota makassar (bank sampah pusat)*. 1–81
- Siyoto, A. S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo, D, H ., Arifin, & Sunarti, (2015). Analisis Strategis Pemasaran Untuk meningkatkan Daya Saing UMKM (studi pada batik djajeng Solo). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 29(1), 59-66.
- Widyatmoko, S. (2020). Program Broadband Learning Center Di Era Disrupsi Berdasarkan Perspektif Collaborative Governance (Studi Kasus Tentang Upaya Keberlanjutan Inovasi Program Broadband Learning Center di Kota Surabaya).